



Pengelolaan Aset Daerah Jadi Catatan Serius

PONTIANAK-RK. Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Sabirin menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalbar harus lebih serius dalam mengelola aset daerah. Apalagi persoalan pengelolaan aset daerah kerap menjadi catatan BPK RI setiap tahun. “Harus ada yang dijadikan perhatian serius. Seperti pengelolaan asset yang masih menjadi catatan setiap tahun. Kita sempat kaget. Karena

masih banyak aset yang dikelola dengan tidak baik,” tegas Sabirin di Gedung Parlemen Kalbar, beberapa waktu lalu. Meskipun demikian, wakil rakyat asal Dapil Kabupaten Sambas ini juga mengapresiasi terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 110,68 persen dari target.

“Ke depan saya berharap agar perolehan PAD harus ditingkatkan

melalui kinerja baik” harapnya.

Sementara itu, terkait pengelolaan SMA dan SMK yang sudah menjadi kewenangan Pemprov Kalbar, Sabirin menyarankan perlunya peningkatan dan penambahan sekolah-sekolah baru untuk menampung para lulusan SMP di Kalbar.

“Jika dilihat perbandingan lulusan SMP dan MTs saat ini. Dengan daya serap atau daya tampung SMA dan

SMK tidak sebanding,” tegasnya. Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berpendapat, Pemerintah Provinsi Kalbar harus ada terobosan guna menambah sekolah baru tingkat atas di Kalbar.

“Sehingga mencerminkan pertumbuhan aspek pemerataan pembangunan serta berdampak pada kemudahan akses pendidikan masyarakat daerah,” ugasnya. (zai)